

## **NOTA KESEPAHAMAN**

Nomor : 3 Tahun 2017

Nomor : 128/SK/BP/ICW/V/17

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertandatangan di bawah ini:

### **KEPALA**

#### **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

dan

### **KOORDINATOR**

#### **BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH**

**Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
INDONESIA CORRUPTION WATCH**

Sepakat mengadakan kerjasama dalam pengembangan Sistem Pemantauan Masyarakat pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal – hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam *workplan* antara pejabat di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat di lingkungan Indonesia Corruption Watch.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017.

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEPALA,**

**INDONESIA CORRUPTION WATCH  
KOORDINATOR,**

t.t.d

t.t.d

**AGUS PRABOWO**

**ADNAN TOPAN HUSODO**